KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Perpanjangan pansus dinilai pemborosan
Tanggal : Sabtu, 16 September 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Perpanjangan Pansus Dinilai Pemborosan

UMAR MUKHTAR, SINGGIH WIRYONO

Perpanjangan karena pansus belum bisa mengambil kesimpulan.

JAKARTA — Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, perpanjangan masa kerja Panitia Khusus Angket KPK di DPR tidak berdasar dan justru hanya akan menghabiskan uang negara. Sebab, akan ada penambahan uang negara untuk perpanjangan tersebut di luar anggaran yang telah ada.

"Perpanjangan menghabiskan uang negara, tidak ada dasar. Alasan yang kuat untuk perpanjangan ini hanya untuk urusan internal sebuah lembaga yang bukan urusan negara. Saya kira masyarakat pembayar pajak keberatan," tutur dia kepada *Republika*, Jumat (15/9).

Menurut Fickar, jika DPR ingin mencari tahu soal teknis pekerjaan KPK, semestinya cukup dengan rapat dengar pendapat (RDP) antara KPK dan Komisi III DPR. Dia menambahkan, terlalu berlebihan mencari tahu itu dengan menggunakan Pansus Angket.

"Ya, urusan internal KPK soal penyidik yang tidak sama pendapatnyalah, soal-soal tetek bengek teknis pekerjaan KPK, terlalu berlebihan menggunakan lembaga DPR untuk mengurusi itu. Cukup dengan RDP saja," tutur dia.

Fickar menjelaskan, lembaga legislatif DPR terlalu besar untuk mengurusi hal kecil, seperti pekerjaan teknis dan juga urusan internal orang per orang di KPK. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya bukan urusan lembaga negara sekelas DPR.

"Beginilah jadinya kalau DPR bukan diisi oleh negarawan, urusannya cuma sakit hati dan balas dendam. Lembaga DPR telah diturunkan muruahnya oleh anggota-anggotanya sendiri. Saya tidak tahu di mana awal kesalahannya."

Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, keberadaan Pansus KPK tak perlu diperpanjang. Terlebih, lanjut dia, jika rekomendasinya justru mengarah pada melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Pendapat saya, sudah Pansus Angket ini tidak perlu diperpanjang. Kita fokus saja sinergi untuk terus memberantas korupsi," kata Zulkifli, Jumat (15/9).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kembali mengatakan, PAN dengan tegas menolak segala upaya untuk melemahkan apalagi membekukan KPK. Keberadaan PAN di pansus, lanjut dia, justru untuk memperkuat KPK dan mencegah agar KPK jangan sampai dilemahkan. "Kalau ada yang mau bubarkan, PAN nomor satu menolak," ujarnya.

Bagi Zulkifli, keberadaan KPK tetap diperlukan. Dengan kelebihan dan kekurangannya, KPK masih dibutuhkan. Jika perlu perbaikan diperbaiki, tetapi jangan sampai ada indikasi pelemahan, terlebih pembubaran KPK.

Sebelumnya, masa kerja Pansus Angket KPK yang dibentuk DPR akan segera berakhir pada 28 September 2017. Beberapa anggota pansus menyuarakan untuk memperpanjang masa kerja pansus dalam sidang paripurna.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi mengatakan, masa kerja Pansus Hak Angket KPK bakal diperpanjang. Hal itu sudah dibicarakan di kalangan pimpinan, meski ia mengakui belum mendapat persetujuan dari semua fraksi. Masa kerja pansus hak angket KPK akan berakhir pada 28 September 2017 mendatang.

"Tapi, karena ada beberapa hal kami anggap bahwa penting, ada beberapa hal, maka kami pimpinan kemungkinan akan meminta seluruh anggota untuk bersedia diperpanjang masa kerja pansus."

Taufiqulhadi mengatakan, perpanjangan tersebut karena beberapa faktor. Salah satunya, Taufiq menyatakan, pansus hak angket KPK belum bisa mengambil kesimpulan apabila belum bertemu pimpinan KPK. Pansus Hak Angket merasa perlu melakukan konfirmasi dengan pimpinan KPK.

ed: muhammad hafil